

# ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DANA DESA DI DESA HAREFA KECAMATAN TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA

*By* SOPIA WARUWU

**9**  
**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI**

**DANA DESA DI DESA HAREFA KECAMATAN TUGALA OYO**

**KABUPATEN NIAS UTARA**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh :**

**SOPIA WARUWU**

**2121013**

**1**  
**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NIAS**

**2024**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang menggunakan akuntansi sebagai informasinya. Tentu saja banyak manfaatnya juga bagi penggunanya. Sistem informasi akuntansi ini merupakan suatu kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang mengumpulkan dan menyimpan data sebagai informasi untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan. Pengguna sistem, khususnya pengguna sistem keuangan, tidak perlu mencatat banyak laporan keuangan tradisional dan sudah dapat memperoleh rumus perhitungan untuk agregasi. departemen dan hal lainnya. Sistem informasi akuntansi tidak hanya untuk perusahaan komersial.

Desa merupakan sarana pelayanan sekaligus kewenangan pengaturan APBD bagi desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan semakin memperhatikan seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Meningkatkan kemampuan desa untuk mengelola pemerintahan mereka sendiri dan melaksanakan pembangunan yang adil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan lokal, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dengan lebih baik.

Hal ini <sup>1</sup> diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif. Berdasarkan <sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana Desa paling sedikit sepuluh persen (10%) dari sisa dana yang diterima Kabupaten/Kota dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dikurangi dana alokasi khusus.

Penggunaan anggaran ini mencakup 30% untuk struktur pemerintahan desa dan biaya operasional serta 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Pengoptimalan sistem informasi akuntansi dana desa melibatkan beberapa faktor penting ,pertama pengetahuan yang kuat tentang prinsip akuntansi dan peraturan terkait pengelolaan dana desa yang sangat diperlukan . Sistem informasi akuntansi dana desa sangat diperlukan hal ini meliputi kemampuan untuk bekerja sama dalam tim , berbagi informasi dengan jelas, dan mendukung upaya bersama untuk mencapai tujuan. Pengoptimalan kapasitas sistem informasi akuntansi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa mempunyai hak asal usul dan hak adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang menjadi landasan mewujudkan cita-cita kemandirian menetapkan bahwa mereka akan memainkan peran. Dalam proses perumusan <sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, desa telah berkembang dengan berbagai cara sehingga perlu dilindungi dan diperkuat agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Kita dapat membangun landasan bagi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Mulyadi (2010), sistem informasi akuntansi adalah sekelompok formulir pencatatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan.

Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan keterampilan dan potensi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Dengan terwujudnya otonomi daerah, diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola dana desa dengan menggunakan sistem informasi akuntansi.

Jika sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena peralatan yang kompeten masih kurang dan pemahaman tentang SIA masih kurang optimal dan tidak terkontrol oleh peralatan.

Sistem informasi akuntansi adalah serangkaian proses yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan informasi keuangan dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan operasi bisnis untuk mendukung aktivitas manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka masalah penelitian yang diangkat :

- a. <sup>9</sup> Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dana desa di Desa Harefa ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai

Adalah:

- a. Untuk menganalisis atau mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi Dana Desa di Desa Harefa Kecamatan tugala oyo , Kab. Nias Utara

### **1.4 Manfaat penelitian**

- a. Bagi peneliti

Peningkatan ketajaman dan pengetahuan penulis serta syarat penyelesaian penelitian juga akan meningkatkan pemahaman dan referensi dalam produksi karya ilmiah, serta penerapan sistem informasi akuntansi dana desa.

- b. Bagi aparatur pemerintahan desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada perangkat desa mengenai optimalisasi sistem informasi akuntansi keuangan desa yang selama ini belum optimal, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mensukseskan proyeknya.

### **1.4 Metode penelitian**

#### **1.4.1 Jenis penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif Merupakan studi yang mempelajari apa yang dialami subjek, seperti perilaku, kognisi, motivasi, dan tindakan, dengan mendeskripsikannya dalam kata-kata dan bahasa menggunakan berbagai metode alami dalam konteks alami tertentu.

, L.

, 2010 : 6).

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penulisan ini menggunakan data sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara kepada informan, observasi langsung, dan observasi objek untuk menganalisis status implementasi sistem informasi akuntansi dana desa.

### 1.5.3 <sup>8</sup> Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria data yang telah ditentukan.

Sekarang mari kita lihat metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan:

#### a. Observasi

Menurut (Sukmadinata ,2005:125) menyatakan bahwa observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang ,dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian (Hardani ,2020:137)

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan , gambar ,atau karya-karya monumental dari seseorang .

**6**  
**1.5.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis yang membantu peneliti menarik kesimpulan. Bogdan dan Sugiyono Analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya agar hasilnya lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis kualitatif bersifat induktif. h.Analisis dilakukan berdasarkan data yang diterima. (B. Menurut Milles dan Huberman, 2014), analisis terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari ketiga aliran tersebut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Reduksi data adalah suatu bentuk penajaman, pengklasifikasian, pengarahannya, penghilangan, dan pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik dan diverifikasinya kesimpulan akhir.

b. Penyajian data

Milles dan Huberman membatasi presentasi mereka pada kumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

Mereka percaya bahwa presentasi yang lebih baik adalah cara terpenting dalam analisis kualitatif yang efektif.

c. Menarik kesimpulan

Menurut Milles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah salah satu bagian dari aktivitas dalam keseluruhan struktur.

Kesimpulannya mungkin sama mudahnya dengan pemikiran kedua yang muncul di benak analis (peneliti).

### **1.5.5 Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Dalam penelitian ilmiah apa pun, diperlukan populasi untuk memperoleh data yang akan dijadikan dasar penelitian Secara empiris.

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2012; 57) adalah suatu wilayah umum yang mempunyai kuantitas dan terdiri dari obyek/subjek yang peneliti pelajari dan tarik kesimpulannya.

Menurut Cooper dan Schindler (2003), populasi adalah sekelompok unsur atau objek yang mempunyai kesamaan sifat yang menjadi fokus penelitian ilmiah.

Oleh karena itu, populasi juga dapat diartikan sebagai suatu bidang generalisasi yang terdiri dari seluruh objek/subyek yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan mempunyai potensi pengambilan keputusan yang sama serta potensi pengambilan keputusan yang sama dengan anggota sampelnya. Dalam penelitian ini, jumlah populasi adalah populasi.

struktur Pemerintahan Desa Harefa Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang berjumlah 25 orang

b. Sampel

Sampel merupakan sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan dengan mudah dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang mewakili populasi yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto (2002), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, yang dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan kesimpulan yang diambil

dari penelitian kepada populasi, dan untuk tujuan menerapkan kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut kepada populasi. Terapkan survei pada populasi dan pastikan sampel yang diambil mewakili populasi.

1. Bendahara Desa : sebagai orang yang bertanggung jawab mengelola dana Desa , Bendahara Desa memiliki pemahaman mendalam tentang Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan.
2. Kepala seksi pemerintahan : memiliki peran penting dalam pengawasan dan implementasi kebijakan ditingkat desa

## **7** **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri dari catatan dan laporan dalam berbagai format yang dibuat untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan. Menurut Susanto Azhar (2013: 22), sistem adalah kumpulan subsistem,

bagian/komponen, baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengetahuan tentang teknologi sistem informasi akuntansi sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi sangat penting untuk daya saing dan kemajuan di masa depan.

Tercapainya tata kelola desa yang baik dapat dimulai dengan melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dimana masyarakat berperan aktif. Sebagai otoritas yang mengatur politik desa, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam perubahan desa.

Pemerintah desa akan semakin mampu mengembangkan dan memperkuat masyarakat desa. Namun banyak pemangku kepentingan yang menilai implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Harefa masih dalam tahap pengembangan. Penerapan sistem informasi akuntansi sangat penting karena menentukan bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara efektif. Sistem informasi akuntansi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengkoordinasian pencatatan dan laporan untuk memberikan informasi keuangan desa yang diperlukan pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada.

Sistem informasi akuntansi yang memenuhi standar dan patuh terhadap peraturan diharapkan dapat mencegah kesalahan yang dapat merugikan dana yang diterima negara, dalam hal ini desa, dan penyelewengan dana desa. Jumlah orang yang menghalangi berlangsungnya pembangunan akan terus bertambah, sehingga memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat. Sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa

berdampak besar terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada, dan sistem informasi akuntansi yang baik berdampak pada pengelolaan dana desa di desa.

Sistem informasi akuntansi adalah sistem pengolahan data akuntansi yang mengkoordinasikan orang, alat, dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam kerangka organisasi terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur (Al Midjan dan Susanto, 2010).

Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan satu atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari aktor, seperangkat prosedur, dan teknologi informasi (Romney dan Steinbart, 2000). Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan berbagai jenis sumber daya, orang, dan peralatan, yang diciptakan untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang dapat digunakan (Bodnar dan Hopwood, 2010).

Menurut James (2011) bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu struktur yang mengelola sumber daya informasi dan mengolah data transaksi menjadi informasi akuntansi yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi.

Wilkinson (2013) bahwa sistem informasi akuntansi sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan organisasi , termasuk laporan keuangan ,laporan manajerial dan laporan khusus lainnya .

## 2.2 Fungsi dan tujuan sistem informasi akuntansi

Fungsi sistem informasi akuntansi adalah bertanggung jawab untuk pengolahan data. Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang paling mendasar dalam setiap organisasi yang paling mendasar dalam setiap organisasi. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam organisasi telah berevolusi dari struktur organisasi sederhana dalam yang meliputi beberapa orang saja sampai struktur yang kompleks yang meliputi banyak spesialis yang bermutu.

<sup>2</sup> Bodnart (2012: 11) yang dikutip dalam Tende Stefy (2015) menyatakan bahwa fungsi sistem informasi bertanggung jawab untuk menangani dan memproses data dengan tujuan meningkatkan pengendalian internal dan meminimalkan biaya yang berlebihan.

<sup>13</sup> Menurut Romney dan Steinbart (2009; 29), fungsi sistem informasi akuntansi adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi, sumber daya yang terkena dampak <sup>13</sup> aktivitas tersebut, dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
- b. Mentransformasikan data menjadi informasi manajerial untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

- 1**  
c. Menyediakan data manajemen yang sesuai untuk melindungi aset organisasi.

Tambahkan data organisasi agar tersedia saat Anda membutuhkannya

- d. Sistem Informasi Akuntansi menyimpan data keuangan dalam database yang terstruktur sehingga data tersebut dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Penyimpanan yang baik juga penting untuk memastikan bahwa data historis tersedia untuk analisis di masa mendatang.

### 2.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansis

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan besar ,tetapi juga sangat bermanfaat bagi Desa dalam mengelola dan administrasi beberapa manfaat Sistem Informasi Akuntansi bagi Desa menurut Para ahli:

Nurcholis (2016) Sistem Informasi Akuntansi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, semua transaksi keuangan tercatat dengan baik dan dapat diaudit sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

### 2.4 Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Lif Saipulah (2017), indikator sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas adalah:

- 12**  
a. Kemanfaatan

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang , berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini .

- b. Daya andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian yang jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

c. Fleksibel, sistem harus dapat dengan cepat beradaptasi pada perubahan pada lingkungan atau kebutuhan dana desa

d. Ketepatan waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

e. Pelaporan dan Analisis:

Kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan.

## 2.5 Desa

Pemerintahan <sup>14</sup> desa adalah organisasi masyarakat hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, dan berkedudukan dalam wilayah kabupaten.

Pemerintah desa memimpin pelaksanaan pembangunan di semua bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, masyarakat, dan operasi bantuan kemanusiaan.

Tugas-tugas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan tugas pembangunan terpadu yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

<sup>1</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan semakin memperhatikan seluruh kepentingan dan kebutuhan desa. Memberi desa kesempatan yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan mereka sendiri dan praktik

pembangunan yang adil akan <sup>1</sup> meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi sejumlah masalah seperti kesenjangan regional, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya setidaknya terselesaikan.

## 2.6 Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Dana ini diatur dalam undang-undang dan merupakan bagian dari upaya desentralisasi fiskal Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan dan <sup>5</sup> mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah APBN Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan sebagai dana penyelenggaraan pemerintahan Kami akan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah dan kota sesuai dengan tujuannya.

. Penyelenggaraan Pembinaan, Pembinaan Pemasarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

## 2.7 Tujuan Dana Desa

1. Peningkatan Pelayanan Publik di Desa: Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa.
2. Pengentasan Kemiskinan: Dana ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di desa dengan mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Hidup: Dana Desa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
4. Penguatan Komunitas: Dana ini juga akan digunakan untuk mendukung kegiatan yang meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat desa agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa di bawah pengawasan masyarakat desa serta pemerintah daerah dan pusat.

Dana tersebut harus digunakan sesuai dengan rencana pembangunan desa yang dibuat berdasarkan pertimbangan desa dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pengelolaan Dana Desa melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib melaporkan penggunaan dana desa secara rutin kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

5. Dana desa merupakan sarana penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dan mencapai kemandirian desa sesuai dengan prinsip otonomi desa.

## 2.7 <sup>2</sup> Pengelolaan Keuangan

Desa Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya mengubah peraturan desa, tetapi juga memungkinkan setiap desa menerima pendanaan dari pemerintah yang jauh melebihi apa yang tersedia saat ini melalui APBN dan APBD. Ini anggaran desa. Kebijakan ini berdampak pada proses pengelolaan dan harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk menghindari risiko penipuan dan korupsi. Saat ini, terdapat .

desa yang mengelola pendanaan dari berbagai sumber, antara lain <sup>2</sup> dana desa, dana bagi hasil pajak pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan swasta dan pihak ketiga.

Penerbitan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelaksanaan anggaran yang baik. Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada Pasal 2 Ayat 1, keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan berdasarkan anggaran dideklarasikan.

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa kepala desa berwenang mengelola <sup>2</sup> keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam hal kepemilikan aset perseorangan desa.

Pasal 3(2) selanjutnya menjelaskan bahwa berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Pasal 1, Kepala Desa berwenang: Menetapkan pedoman

pelaksanaan APBD di Desa; PTPKD didirikan. Menunjuk pejabat yang memungut pendapatan desa. Menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBD desa. Melakukan tindakan yang menimbulkan biaya atas beban APBD Desa. Sedangkan kepala desa mengelola keuangan desa dengan dukungan PTPKD: .

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) timbul dari unsur organisasi desa.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sebagai koordinator teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mempunyai tugas sebagai berikut: Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengelolaan APBDes desa; Bertanggung jawab menyusun APBDes Desa, memodifikasi APBDes Desa, dan melaksanakan APBDes Desa. Mengelola pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Desa. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Desa dan melakukan verifikasi penerimaan pendapatan dan belanja APBDesa. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1, kepala departemen bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Kepala departemen mempunyai tugas.

Siapkan rencana implementasi untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab Anda. Pelaksanaan kegiatan pada fasilitas masyarakat desa ditetapkan dengan APBD desa. Melakukan tindakan pengeluaran yang mengakibatkan pennebetan anggaran kegiatan. Mengelola pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Buat anggaran untuk pengeluaran yang diperlukan untuk kegiatan.

Fungsi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) dilaksanakan oleh pegawai departemen keuangan.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembukuan penerimaan, penyimpanan, penyeteroran atau pengeluaran, pengelolaan <sup>10</sup> dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDes desa.

## 2.8 Pelaksanaan Anggaran Desa

<sup>3</sup> Pada saat pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan, terjadilah transaksi pendapatan dan belanja desa. Segala pemasukan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaan kekuasaan Desa ditangani melalui Rekening Uang Desa. Apabila di wilayah desa belum terdapat layanan perbankan, peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Segala pemasukan dan pengeluaran Desa harus dibuktikan dengan kuitansi yang lengkap dan sah. Beberapa aturan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: Pemerintah desa dilarang memungut pendapatan desa yang tidak ditentukan dalam peraturan desa.

Implementasi anggaran desa merupakan proses pelaksanaan rencana keuangan yang dibuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang ditetapkan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah tahapan umum dalam pelaksanaan anggaran desa:

1. **Penerimaan Anggaran:** Dana yang dialokasikan ke desa dari berbagai sumber seperti: Dana desa, alokasi dana desa (ADD), dan pendapatan asli desa masuk ke pemerintah desa.
2. **Penetapan Anggaran:** Pemerintah desa menetapkan rincian penggunaan anggaran sesuai dengan APBDes yang telah disetujui. Ini termasuk alokasi dana untuk berbagai program dan proyek yang akan dilaksanakan.
3. **Penggunaan Anggaran:** Dana yang dialokasikan akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang direncanakan. Penggunaan dana tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
4. **Pemantauan dan Pengendalian:** Pelaksanaan anggaran dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan.
5. **Pelaporan:** Pemerintah desa wajib menyusun laporan pelaksanaan anggaran yang mencakup rincian penggunaan dana dan capaian program. Laporan ini biasanya disampaikan kepada Badan Desa (BPD) dan masyarakat desa sebagai bentuk transparansi.
6. **Evaluasi :** Setelah pelaksanaan anggaran dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi ini akan berkontribusi pada perbaikan perencanaan anggaran desa di masa depan.

Anggaran ditinjau oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.

Selanjutnya anggaran kegiatan didebet dengan menggunakan buku kas kegiatan sebagai rekening giro.

## 2.9 Penelitian terdahulu

Penelitian masa lalu, atau “penelitian literatur”, mengacu pada penelitian yang sebelumnya dilakukan dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Hasil penelitian terdahulu menjadi acuan untuk memahami perkembangan, konsep, dan teori yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada.

Pada bagian ini peneliti membuat daftar berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan mereka lakukan dan menunjukkan apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan.

Di bawah ini merupakan hasil penelitian terdahulu mengenai tema yang dikaji oleh penulis.

**Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti	Judul penelitian	Jenis penelitian	Hasil penelitian
Destina sari(2017)	Evaluasi sistem informasi akuntansi prosedur penyetoran	Deskriptif Kualitatif	Pembangunan sistem informasi akuntansi penyetoran dan

	dan penarikan tunai subsidi operasional sekolah (BOS).		penarikan subsidi pengelolaan sekolah juga berjalan lancar.
Yanti, M. L. K., & Musmini, L. S. (2020)	Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan Transparansi pengelolaan Keuangan Pamsimas pada BUMDes Giri Artha	Deskriptif kualitatif	BUMDes Sistem informasi akuntansi yang diperkenalkan oleh Giri Arths merupakan aplikasi yang dapat meningkatkan transparansi.
Vistarini(2019)	Analisis faktot-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Lembaga Perkreditan di Kecamatan Abiansemal	Deskriptif kualitatif	Kami menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna dan keterampilan teknis pribadi mempunyai dampak positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (SIA).

Wibawa (2019)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada Dinas Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar	Kualitatif	Keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, dukungan manajemen, dan komunikasi antara pengguna sistem informasi akuntansi dan pengembang memberikan dampak positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.
Eggy dan Nugroho(2020)	Pengaruh pentingnya sistem kualitas sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah	Kualitatif	Kualitas sistem ini berdampak positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi.

	Kota Kabupaten Klaten		
--	--------------------------	--	--

2.10 Kerangka berpikir



Kerangka ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

## BAB III

### HASIL <sup>3</sup> DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran umum lokasi penelitian

##### 3.1.1 Sejarah Singkat Desa Harefa

Desa Harefa Adalah Desa Adat , asal mula berdirinya Desa Harefa Diadakan pertemuan atau musyawarah Untuk Membentuk Nama Desa Yaitu Desa Harefa Yang dibawa pimpinan BALUGU FAULU MBÖWÖ WARUWU ,Pada awalnya Desa Harefa termasuk Kecamatan Mandrehe Nias Barat , Pada tahun 2008 Desa Harefa pindah dikecamatan Tugala oyo kabupaten nias utara .

##### 3.1.2 Visi dan Misi Desa Harefa

###### a. visi

mewujudkan Desa Harefa sebagai desa mandiri , sejahtera , dan berbudaya dengan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

###### a. Misi

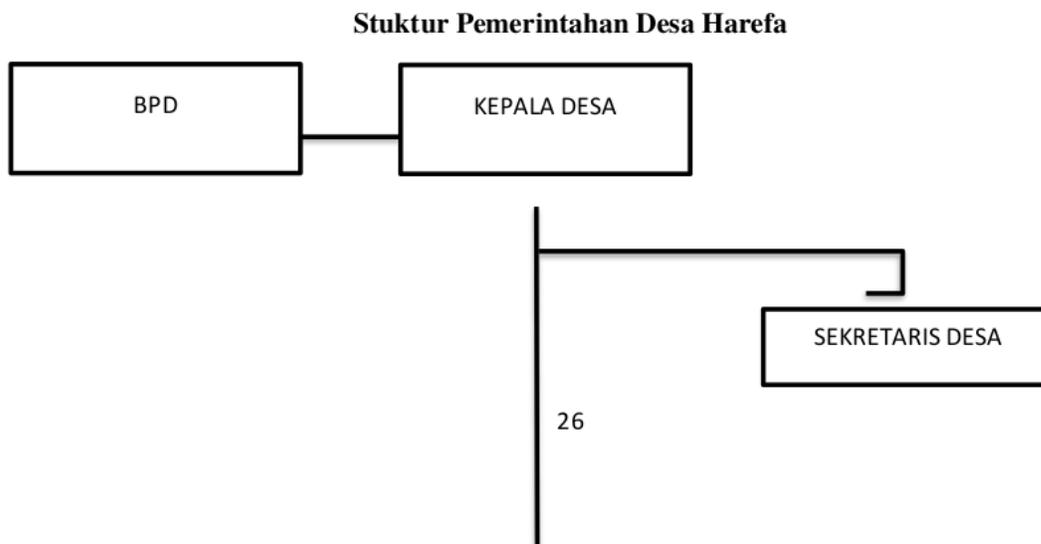
1. Membangun atau memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan hidup warga.

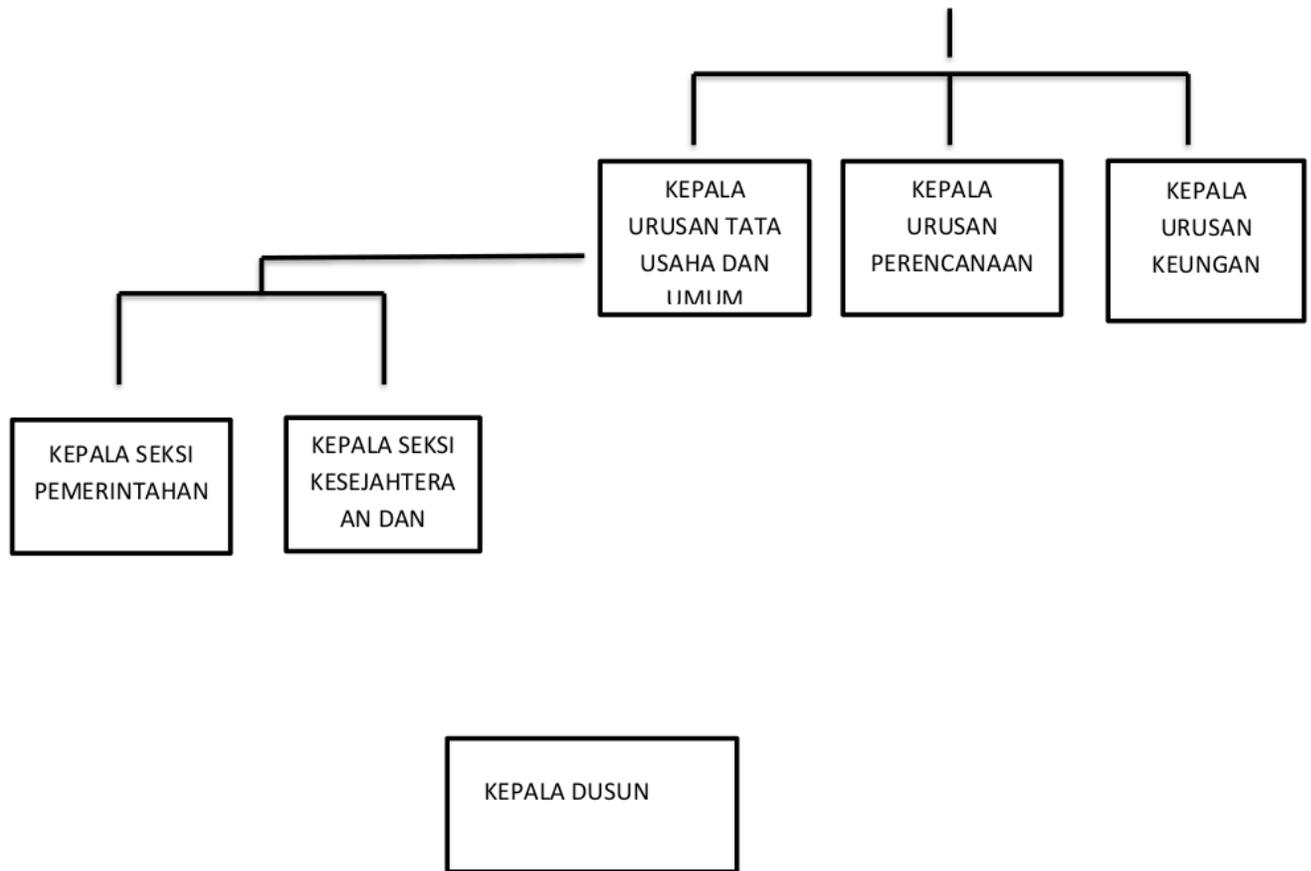
2. Melaksanakan pengembangan desa Harefa sesuai kebutuhan masyarakat. Secara khusus, kami akan membangun sumber air bersih dan membuka jalan baru yang menghubungkan desa dan desa.
3. Membangun desa selaku mitra kerja sama sehingga roda pemerintahan desa lebih berkualitas
4. Memprioritaskan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat desa Harefa guna agar masyarakat lebih menikmati pembangunan.
5. Mengembangkan program pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Harefa

Struktur pemerintahan desa adalah struktur organisasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Struktur ini terdiri dari berbagai unsur yang masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab berbeda dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Gambar 4.1





Secara umum tugas , hak dan kewajiban pengurus pemerintahan Desa Harefa

a. Kepala Desa

Peran kepala desa adalah memimpin pemerintahan desa dalam seluruh aspek pemerintahan desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan desa, pemajuan dan pembangunan masyarakat, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa, serta pemajuan desa.

Hal ini untuk memimpin pelaksanaan Partisipasi masyarakat di desa Tanggung jawab utama ada pada kepala desa:

1. Menetapkan kebijakan Desa berdasarkan musyawarah dengan BPD dan masyarakat Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pengelolaan keuangan desa (termasuk pengalokasian dana desa sesuai peraturan dan kebutuhan masyarakat desa).
4. Mengelola aset Desa termasuk penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat .

b. Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam urusan administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan komunikasi, dokumen, arsip desa, dan koordinasi kegiatan.

perangkat desa serta memantau dan mengevaluasi kinerja , menyiapkan dan menyusun laporan tahunan , laporan akhir ,serta laporan pelaksanaan pembangunan desa.wewenang sekretaris desa :

1. Mewakili kepala desa dalam urusan administrasi terutama jika kepala desa tidak dapat hadir atau berhalangan
2. Melaksanakan tugas yang diberikan dan dilimpahkan oleh kepala desa, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan.
3. Sekretaris Desa memiliki wewenang untuk menandatangani dokumen-dokumen resmi atas nama pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan.

c. Bendahara Desa

Bendahara desa bertugas mengelola keuangan desa, meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pencairan dana desa. Ia terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bertugas melaksanakan anggaran sesuai rencana yang telah disetujui. Selain itu, bendahara desa juga bertanggung jawab menyusun dan melaporkan kepada kepala desa dan instansi terkait laporan keuangan desa yang meliputi laporan pendapatan, pengeluaran, dan saldo kas desa. Bendahara Desa mengelola dana desa. Hal ini mencakup dana transfer dari pemerintah pusat, negara bagian, kabupaten/kota, dan dana lain yang diterima desa. Ia juga bertanggung jawab untuk mengelola pajak dan bea yang harus dibayar oleh desa dan memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dipenuhi tepat waktu. Izinnya adalah:

1. Bendahara Desa berwenang untuk mengelola rekening kas desa, termasuk melakukan penyetoran, penarikan, dan pengelolaan saldo rekening desa.
2. Bendahara Desa berwenang untuk melakukan pembayaran berdasarkan instruksi dari Kepala Desa atau sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam APBDes.
3. Bendahara Desa berwenang menandatangani laporan keuangan mengenai penerimaan dan penggunaan Dana Desa.
4. Bendahara Desa berwenang memelihara Buku Kas Desa dan menjamin seluruh transaksi keuangan tercatat secara akurat dan sesuai prosedur.

d. Kepala urusan perencanaan

Direktur Perencanaan Desa bertugas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), dan dokumen perencanaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat.

Sekretaris Perencanaan bertugas mengumpulkan data dan informasi tentang potensi, permasalahan dan kebutuhan desa yang menjadi dasar rencana pembangunan desa.

Adapun wewenangnya:

1. Menyusun kebijakan pembangunan desa mengenai pembangunan desa, mendiskusikan dan menyepakatinya dalam forum musyawarah desa.
2. Evaluasi dan evaluasi terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan desa baik oleh masyarakat maupun perangkat desa.
3. Mengajukan rencana pembangunan yang telah disusun kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan dan pelaksanaan .

e. Kepala urusan tata usaha dan umum

Mengelola administrasi umum desa pengelolaan surat menyurat ,dokumentasi dan arsip, mengelola administrasi kepegawaian seperti pencatatan absensi ,kenaikan pangkat , mutasi . wewenang kepala urusan tata usaha dan umum:

1. Mengatur dan mengelola semua aspek administrasi harian didesa , termasuk penataan dan penyimpanan dokumen penting.
2. Mengambil keputusan pengelolaan administrasi ,pencatatan inventaris

3. Mendatangi dokumen administrasi yang berkaitan yang berkaitan tugas dan fungsinya
4. Sistem pengarsipan dokumen dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dapat di akses dengan mudah dan cepat .

f. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan desa

Merancang dan menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa, mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat desa, termasuk dukungan dari pemerintah pusat dan daerah; maupun lembaga lain adapun wewenang nya :

1. mengajukan Mengusulkan program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik secara sosial maupun ekonomi. kesehatan.
2. Mengelola dan menyalurkan bantuan dan pelayanan sosial kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. mengadakan pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan program kesejahteraan sosial dan layanan publik.
4. Koordinasi program kesejahteraan sosial dan pelayanan desa dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Kepala seksi pemerintahan desa

Membuat rencana aksi di bidang pemerintahan desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, dan keselamatan desa. Mengelola administrasi pemerintahan desa, termasuk administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Wewenangnya :

h. Kepala dusun

membina kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dusun, serta mendorong partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. mengelola dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa yang berada di wilayah dusun, serta melaporkan perkembangan dan hasilnya kepada Kepala Desa. mengelola dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa yang berada di wilayah dusun, serta melaporkan perkembangan dan hasilnya kepada Kepala Desa. Wewenannya :

1. mengatur dan mengelola berbagai kegiatan di dusun, termasuk kegiatan pembangunan, sosial, dan keagamaan yang melibatkan masyarakat setempat.
2. mengambil keputusan-keputusan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah dusun, sesuai dengan arahan dan kebijakan desa.
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program di desa.

4. menjaga dan memelihara aset-aset milik desa yang berada di wilayah dusun, memastikan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.

## **3.2 Hasil penelitian**

### **3.2.1 Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dana Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, apa manfaat penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dana Desa di Desa Harefa?

Dijelaskannya, pencatatan yang sistematis membantu pengelolaan dana desa dengan mengurangi kesalahan manual dan memastikan seluruh input dan output tercatat dengan benar .

Setelah menerapkan sistem informasi akuntansi desa, apakah Anda yakin bahwa data yang ditampilkan dalam sistem benar-benar lengkap dan akurat? Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk memanfaatkan sistem informasi akuntansi secara efektif, Anda memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan yang saya temukan keluar bahwa itu perlu. Kesalahan seperti memasukkan data yang salah dapat mempengaruhi keandalan informasi

Setelah penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Desa Harefa apakah suatu informasi yang disajikan berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Dari hasil wawancara tersebut menyatakan Setelah penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Desa Harefa, informasi yang disajikan memang berpotensi besar mempengaruhi pengambilan keputusan, informasi dapat diakses lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan para pemimpin desa atau pengambil keputusan untuk merespons situasi secara lebih cepat dan sesuai kebutuhan. Penerapan sistem informasi akuntansi di Desa Harefa dapat

memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, baik dari sudut pandang operasional sehari-hari maupun perencanaan strategis jangka panjang.

Setelah diterapkannya sistem informasi akuntansi, bagaimana sistem informasi akuntansi desa beradaptasi terhadap perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa? Dari hasil wawancara, aparat desa yang membidangi pengelolaan keuangan desa secara rutin terlihat jelas bahwa ada adalah kebutuhan untuk pelatihan. Pelatihan ini mencakup pemahaman peraturan baru dan penerapannya ke dalam sistem informasi akuntansi yang sudah ada. Sistem informasi akuntansi dana desa harus dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah atau pusat. Hal ini memungkinkan Desa untuk secara otomatis memperbarui data dan metode pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah menerapkan sistem informasi akuntansi desa, apakah sistem informasi akuntansi ini mempunyai fitur otomatisasi untuk mempercepat proses pembuatan laporan keuangan? Dari hasil wawancara terlihat jelas bahwa ini adalah sistem informasi akuntansi Desa biasanya dilengkapi dengan fitur otomatisasi yang dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Fitur ini memungkinkan integrasi data secara langsung dari berbagai transaksi keuangan yang terjadi di desa, seperti penerimaan, pengeluaran, dan anggaran.

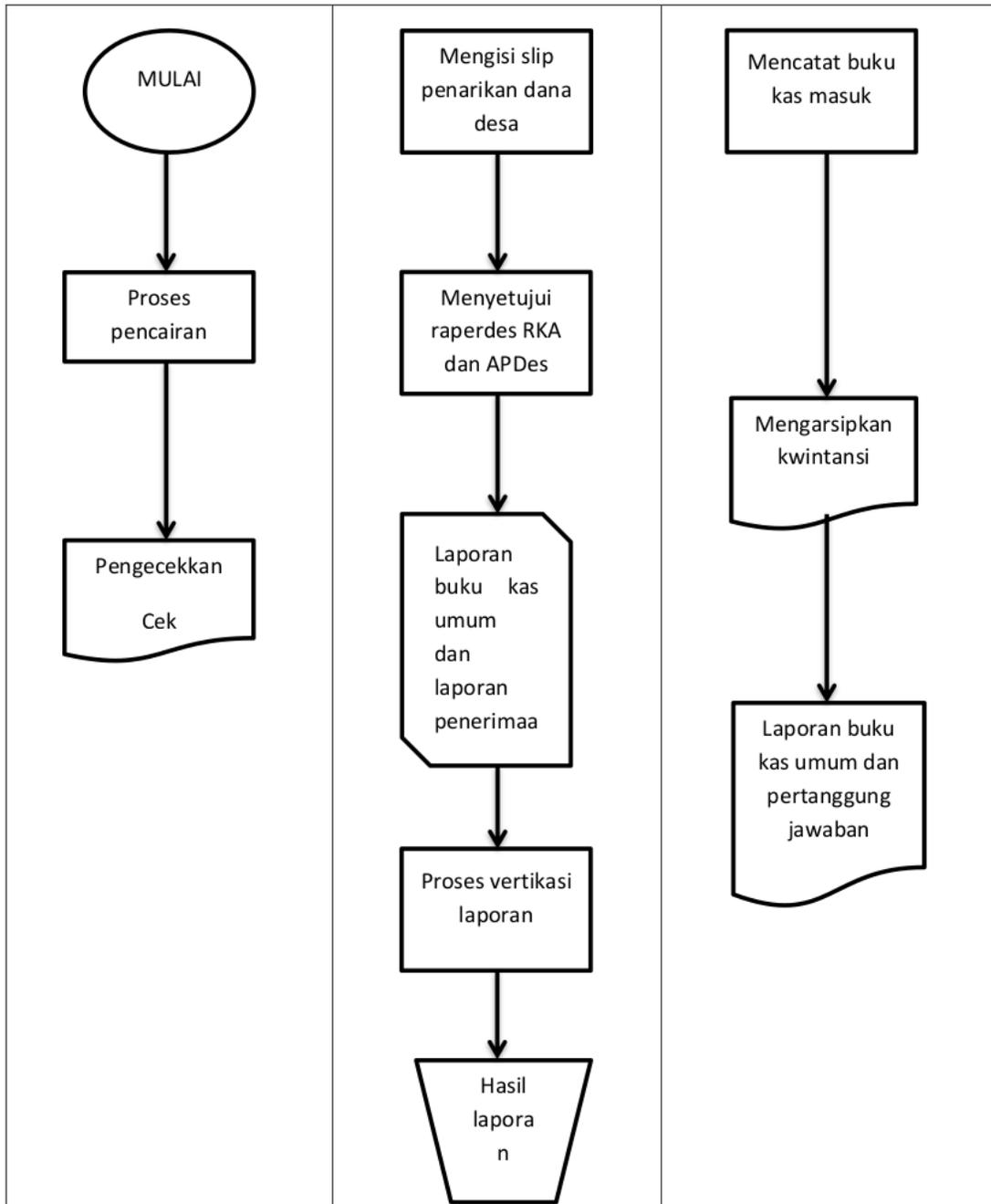
Otomatisasi memungkinkan sistem menghasilkan laporan keuangan secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan, mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses pelaporan.

Beberapa sistem juga memungkinkan Anda membuat laporan yang lebih kompleks dengan lebih efisien, seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, serta laporan neraca dan operasional.

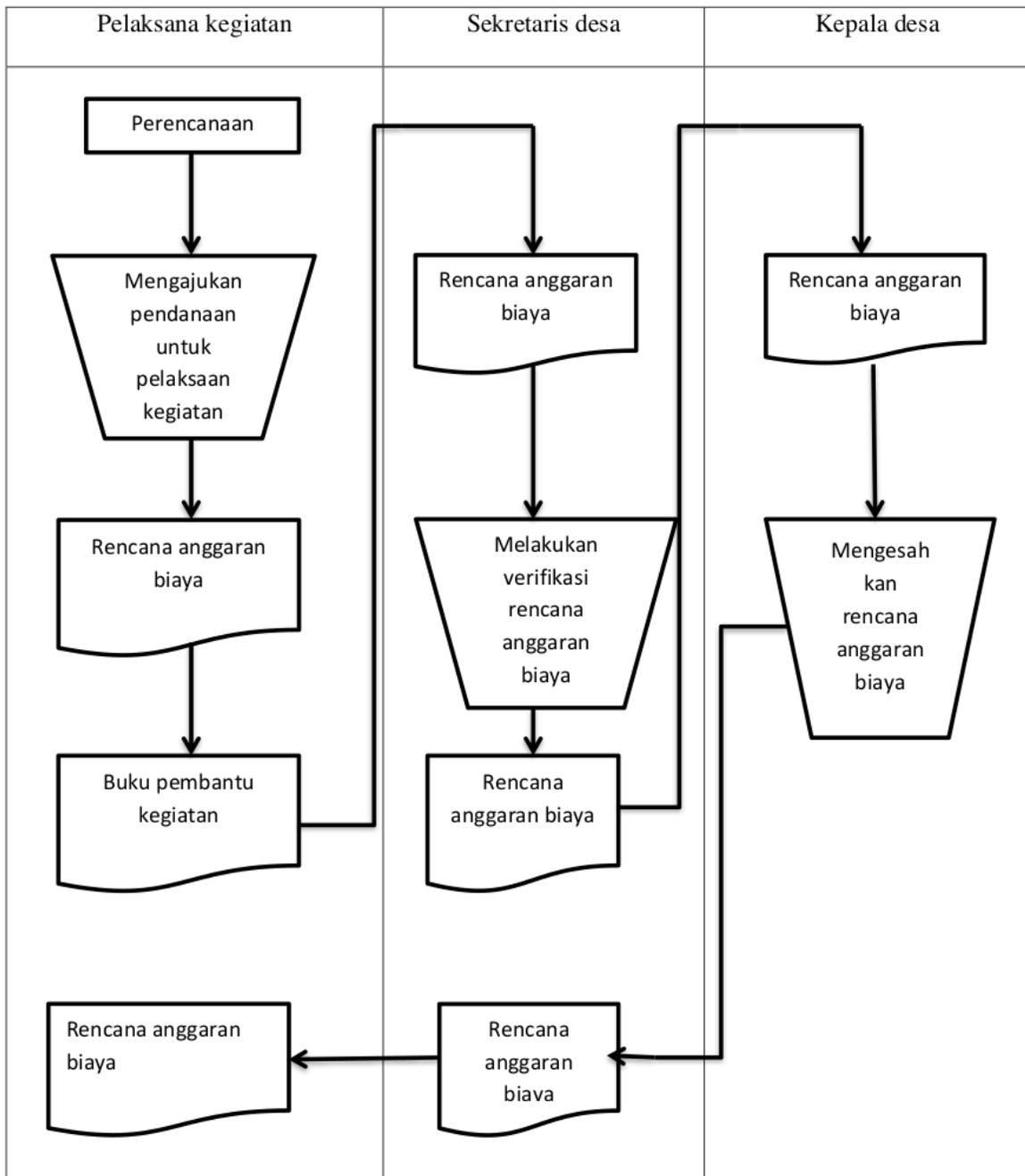
### **3.3 Pembahasan**

Flow chart (bagan alir) Sistem informasi akuntansi

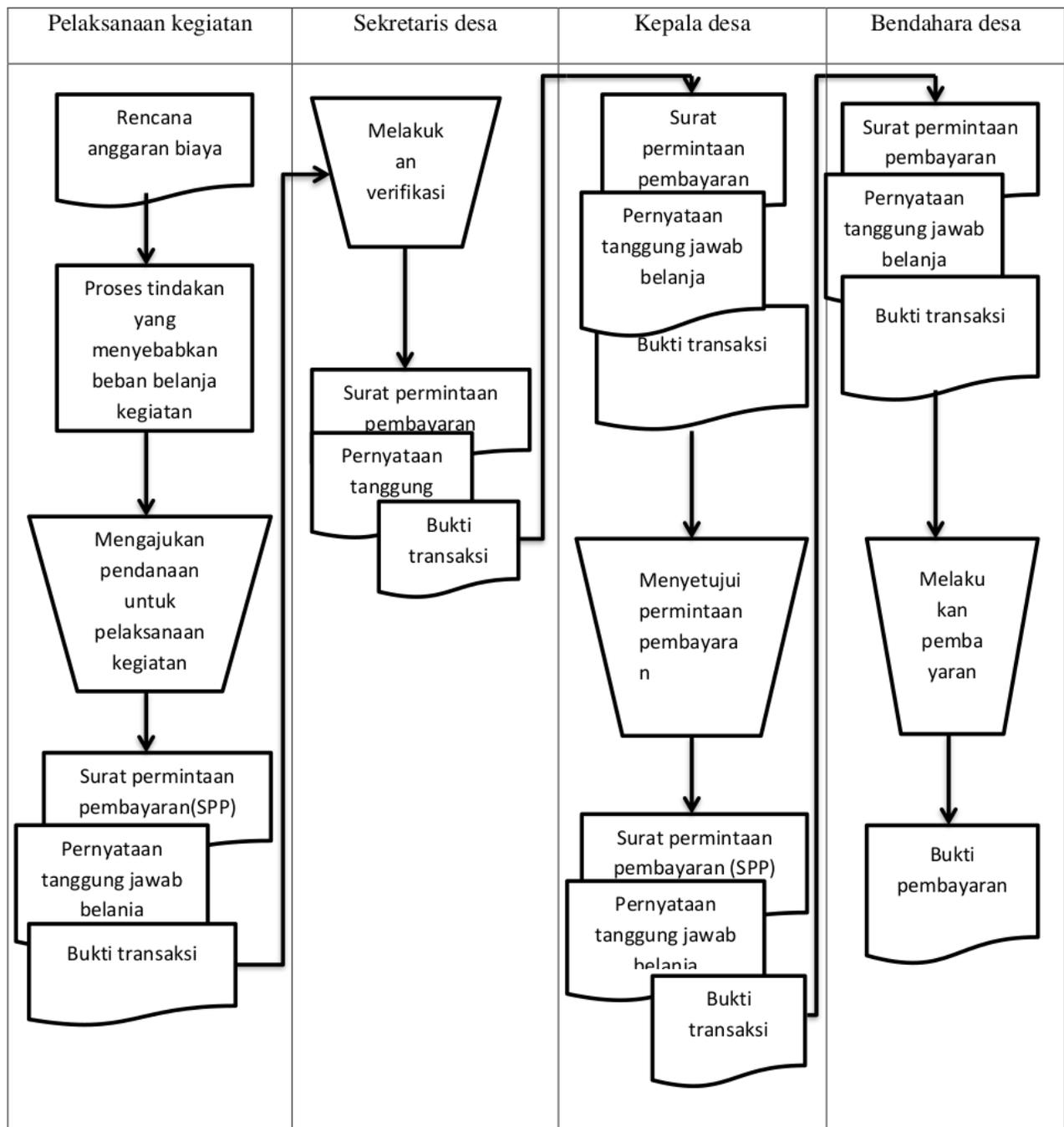
Dana Desa	Kepala Desa	Bendahara Desa
-----------	-------------	----------------



Flow chart (bagan alir) penyusunan RAB



Flow chart (bagan alir) pengajuan SPP



## Bab IV

### Kesimpulan

4.1 Kesimpulan Berdasarkan analisis implementasi <sup>1</sup> sistem informasi akuntansi dana desa di desa Harefa, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut.

- a. Sistem Informasi akuntansi dana Desa sangat sangat bermanfaat bagi dalam pengelolaan dana desa . dengan pencatatan transaksi yang dilakukan secara otomatis dan sistematis , sistem ini membantu mengurangi kesalahan manual serta memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar tercatat dengan benar ,hal ini meningkatkan efesiensi dan akurasi dalam pengelolaan dana Desa.
- b. Meskipun sistem informasi akuntansi ini memiliki potensi untuk menghasilkan data yang andal dan akurat. Keandalan informasi sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan pengguna sistem informasi akuntansi.
- c. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dana Desa memberikan dampak positif pada proses pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan melalui sistem ini dapat diakses dengan cepat dan efisien, memungkinkan para pemimpin desa untuk merespons situasi dengan lebih tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam operasional sehari-hari dan perencanaan strategis jangka panjang.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk memaksimalkan manfaat dari sistem Informasi Akuntansi Dana Desa, penting untuk terus meningkatkan pelatihan dan kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan sistem ini. Pelatihan berkala yang mencakup pemahaman regulasi baru dan penerapan sistem akan membantu meningkatkan keandalan dan akurasi data yang dihasilkan.
  
- b. Untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dana Desa secara optimal, harus ditingkatkan infrastruktur teknis desa, termasuk jaringan Internet yang stabil dan perangkat keras yang sesuai. Hal ini memastikan sistem berfungsi dengan baik dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi (2010) sistem informasi akuntansi

Moleong L (2010:6) penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

Sukmadinata ,(2005:125) menyatakan bahwa observasi (*observation*)

Hardani (2020;137) wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu.

B.Milles dan Huberman (2014) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

Sugiyono (2012;57) wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

Cooper dan Schinlder (2003) populasi adalah sekumpulan elemen atau objek

Suharsimi Arikunto (2002) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti

Susanto Azhar (2013:22) menjelaskan bahwa sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem bagian

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2000). Sistem informasi akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat.*

Bodnar dan Hopwood (2010) sistem informasi akuntansi kumpulan berbagai macam sumber daya

Bodnart (2012;11) dikutip dalam tende Stefy(2015) fungsi sistem informasi akuntansi

Nurchlois (2016) sistem informasi akuntansi membantu meningkatkan transparansi

Lif Saipulah (2017) indikator sistem informasi akuntansi

SARI, Destina; MASITOH, Endang. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Prosedur Penerimaan & Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Andong Boyolali. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2017, 18.01.

Yanti, M. L. K., & Musmini, L. S. (2020). menerapkan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan Pamsimas pada Bumdes Giri Artha. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1),

Vistarini(2019). Analisis faktot-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Lembaga Perkreditan di Kecamatan Abiansemal (LPD) DI KECAMATAN

ABIANSEMAL (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Wibawa (2019). Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada lembaga perekreditan Desa(LPD)di Kota Denpasar.

Eggy, Y. N. (2020). Pengaruh pentingnya sistem kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).

## LAMPIRAN

### DAFTAR WAWANCARA

1. Apa manfaat <sup>9</sup> penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dana Desa di Desa Harefa ?
2. Apakah setelah penerapan Sistem Informasi Akuntansi Desa bisa memastikan keandalan data yang disajikan lengkap dan akurat dalam sistem informasi akuntansi dana desa ?
3. Setelah <sup>9</sup> penerapan sistem informasi akuntansi dana desa di desa Harefa, apakah informasi yang disajikan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan?
4. Setelah diterapkannya sistem informasi akuntansi, bagaimana sistem informasi akuntansi desa beradaptasi terhadap perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa?
4. Setelah penerapan Sistem Informasi Akuntansi Desa Apakah sistem Infomasi Akuntansi ini memiliki fitur otomatisasi untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangan ?



# ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DANA DESA DI DESA HAREFA KECAMATAN TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA

---

ORIGINALITY REPORT

---

# 12%

SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet	115 words — 2%
2	<a href="https://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet	82 words — 1%
3	<a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet	63 words — 1%
4	<a href="https://repository.stie-mce.ac.id">repository.stie-mce.ac.id</a> Internet	56 words — 1%
5	<a href="https://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet	54 words — 1%
6	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet	47 words — 1%
7	<a href="https://repository-feb.unpak.ac.id">repository-feb.unpak.ac.id</a> Internet	42 words — 1%
8	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet	35 words — 1%
9	<a href="https://journals.unihaz.ac.id">journals.unihaz.ac.id</a> Internet	35 words — 1%

10	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet	33 words — 1%
11	<a href="http://akuntansi.pnp.ac.id">akuntansi.pnp.ac.id</a> Internet	32 words — 1%
12	<a href="http://eprints.umpo.ac.id">eprints.umpo.ac.id</a> Internet	32 words — 1%
13	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet	31 words — 1%
14	<a href="http://ngada.org">ngada.org</a> Internet	29 words — 1%

EXCLUDE QUOTES OFF  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 1%  
EXCLUDE MATCHES OFF